

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM  
MENDORONG MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DALAM  
PEMBANGUNAN DESA KENDEKAN KECAMATAN WALENRANG  
TIMUR KABUPATEN LUWU  
(Studi Penelitian Di Desa Kendekan KabupatenLuwu)**

**Umar Laila<sup>1</sup>, Sunarding<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Andi Djemma, Palopo  
Email : [umarlailaunanda@gmail.com](mailto:umarlailaunanda@gmail.com)

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Andi Djemma, Palopo  
Email : [sunarding@unanda.ac.id](mailto:sunarding@unanda.ac.id)

**ABSTRAK**

*Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbang pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan desa dapat diartikan sebagai pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dimana merupakan proses peningkatan kemampuan penduduk desa untuk memahami dan menguasai lingkungan sosial yang disertai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan di desa dan masyarakat juga dianjurkan untuk berpartisipasi dalam setiap program-program pembangunan itu sendiri supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan tergantung bagaimana cara dan upaya pemerintah yang ada di desa itu sendiri. Dalam masyarakat yang demokratis serta arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Maka dengan sendirinya masyarakat akan terdorong untuk ikut serta dalam pembangunan itu sendiri. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.*

**Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Berpartisipasi**

**PENDAHULUAN**

Diera globalisasi ini fenomena pembangunan dihadapkan pada permasalahan yang semakin bertambah kompleks, maka untuk mewujudkan konsep masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu hal yang mudah dalam pelaksanaannya. Agar pembangunan nasional dapat mewujudkan cita-cita seperti yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, maka diperlukan adanya keterlibatan seluruh komponen bangsa secara proporsional. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang

strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbang pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Negara kesatuan merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi, dimana penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pusat tetapi daerah diberikan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan.

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sebagai suatu proses, yaitu kegiatan terus menerus dilaksanakan dalam tahap-tahap tertentu secara sadar dan terencana yang mengarah pada modernitas untuk mencapai tujuan negara.

Konsep pembangunan, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari pola sistem politik serta sistem administrasi negara yang dianut. Ini terjadi karena administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan mensukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya. (Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya).

Keterkaitan ini dapat dilihat mulai dari bagaimana paradigma oleh public administration berkembang di Indonesia, dimana pemerintah mendominasi jalannya pembangunan seperti di era Presiden Soeharto. Diera tersebut, pemerintah adalah aktor utama yang dapat monopoli pembangunan. Sementara masyarakat hanyalah sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Akibatnya, pembangunan lebih bersifat sentralistik, atau dalam istilah *Korten & Klauss*. (Nasdian, Fredian Tonny. 2014. Pengembangan Masyarakat). Dikenal sebagai *production centered development* (pembangunan berbasis produksi). Padahal, pembangunan baru akan berhasil apabila melibatkan seluruh rakyat dalam suatu negara.

Pola pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai objek ini akhirnya berujung pada lahirnya multi krisis pada tahun 1997 yang berdampak sistemik terutama pada isu strategis (kemiskinan, pengangguran, moneter dan lain-lain). (Vestikowati, Endah. 2012). Pembangunan yang menekankan pencapaian ekonomi ini juga terbukti tidak terwujud khususnya di negara-negara berkembang. (Theresia, Aprillia, dkk. 2014). Hal ini kemudian menuntut adanya penguatan pada sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dengan adanya reformasi. Peran dan fungsi pemerintah mulai dibatasi agar tidak lagi monopoli pembangunan. Pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dengan menggunakan prinsip kewirausahaan (*reinventing government* /

*privatisasi*). Paradigma ini menekankan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang ada di sektor swasta salah satunya adalah prinsip wirausaha yang selama ini dianggap kunci keberhasilan sektor swasta serta perampingan birokrasi. (Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik).

Prinsip privatisasi yang menekankan pemerintah untuk memusatkan perhatian pada keluaran (output) yang efisien serta semangat wirausaha yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan pengguna jasa (pelanggan/objek pembangunan) justru menemui masalah mendasar. Masalah tersebut adalah bahwa rakyat di lapisan bawah tidak menikmati hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah yang mulai terbatas serta masih dijadikannya masyarakat sebagai objek pembangunan. Selain itu kesenjangan sosial semakin melebar akibat investasi yang dilakukan pemerintah (sebagai aktualisasi prinsip wirausaha dan semangat menghasilkan output efisien) lebih banyak digunakan untuk pembelian mesin produksi yang efisien sehingga justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja. (Theresia, Aprillia, dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat). Maka dibutuhkan paradigma baru untuk menjadikan semua stakeholder dalam pembangunan mempunyai peran yang seimbang guna mencapai tujuan utama pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat. Karena yang dimaksud kesejahteraan bukanlah hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman, namun lebih dari itu.

Goulet dalam Theresia mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai yang terkandung dalam kesejahteraan, yakni :

- a) Tercapainya swasembada (kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, dan sebagainya);
- b) Peningkatan harga diri (berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain);
- c) Diperolehnya kebebasan untuk mengembangkan usaha memperbaiki mutu hidup tanpa adanya tekanan dari pihak lain. (Theresia, Aprillia dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat).

Pada akhirnya suatu paradigma baru lahir dengan menyajikan potensi-potensi baru guna memantapkan pertumbuhan dan

kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian manusia itu sendiri, yang kemudian disebut sebagai pembangunan berbasis rakyat (*people centered development*). Dengan berorientasi pada pembangunan berbasis rakyat, maka paradigma pembangunan di tingkat nasional, lokal, hingga komunitas merujuk pada implementasi prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi pemberdayaan, pelestarian, jejaring sosial (kemitraan), dan prinsip *sustainability*. (Nasdian, Fredian Tonny. 2014. Pengembangan Masyarakat). Paradigma ini sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam paradigma administrasi negara dari *government ke governance*.

Paradigma *governance* (atau yang lebih populer disebut *good governance*) menekankan kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat madani (*civil society*). (Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik). Menurut Laksana. (Laksana, Nuring Septyasa. 2013). Paradigma pembangunan ini menuntut adanya keseimbangan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil (*civil society*). Lebih lanjut, menurut Laksana, *good governance* menekankan bahwa pemerintah harus mau untuk berinteraksi secara kondusif dengan masyarakat dalam berbagai bidang.

Perubahan paradigma di Indonesia secara signifikan mulai terlihat setelah terjadinya reformasi dimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 guna memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah agar dapat melakukan pembangunan yang optimal sesuai dengan potensinya. Perubahan ini mengubah paradigma pembangunan nasional secara signifikan dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan pembangunan masyarakat. Sebelum reformasi, pembangunan lebih menekankan masyarakat sebagai obyek yang dikenai pembangunan. Atau, dengan kata lain pembangunan bersifat sentralistik (*Top-down*). Sedangkan setelah reformasi, pembangunan melibatkan masyarakat sebagai subyek yang menentukan arah pembangunan, bukan lagi sebagai obyek (*bottom-up*).

Dalam pembangunan suatu desa yang paling berperan adalah penyelenggara pembangunan terutama dalam segala bidang. Untuk mencapai tujuan pembangunan,

pemerintah dan masyarakat desa harus bekerjasama agar pembangunan itu berjalan lancar, apabila masyarakat dan pemerintah desa tidak bekerjasama maka pembangunan itu tidak akan berjalan dengan baik.

Pemerintah desa bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan di desa dan masyarakat juga dianjurkan untuk berpartisipasi dalam setiap program-program pembangunan itu sendiri supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan tergantung bagaimana cara dan upaya pemerintah yang ada di desa itu sendiri. Dalam masyarakat yang demokratis serta arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Maka dengan sendirinya masyarakat akan terdorong untuk ikut serta dalam pembangunan itu sendiri.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan basis dasar bagi pembangunan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan desa akan menghasilkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, hal ini mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan suatu hal yang penting yang perlu dilakukan dan didukung oleh semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Karena begitu pentingnya pelaksanaan pembangunan desa maka kiranya perlu suatu perencanaan yang terpadu dengan asumsi bahwa pembangunan dilakukan dari rakyat dan oleh rakyat.

Pembangunan desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pembangunan desa bertujuan dan di arahkan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur material, spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis. Pembangunan memiliki hakikat dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di pedesaan, seperti yang di kemukakan oleh Prasetya bahwa. (Prasetya, Todaro. 2006.

Pengembangan Dalam Kemajuan Desa) “Tidak berlebihan jika kemudian pembangunan dilaksanakan sebagaimana kecenderungan yang terjadi di negara-negara berkembang lebih kepada mengejar pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, padahal pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses yang multidimensional mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.”

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan partisipasi dan dukungan, maka tujuan dan harapan dari pembangunan dapat diwujudkan. Apabila pembangunan itu tidak mendapat respon, dukungan dan partisipasi dari masyarakat maka akan sangat susah pembangunan itu dilaksanakan, hasil pembangunan tidak akan maksimal ataupun tidak akan terlaksana. Maka disini sangat dituntut peran dan upaya pemerintah mempengaruhi, mengambil simpati masyarakat, hingga mendorong, berkeinginan dari dalam masyarakat untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam pembangunan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan wajib dikembangkan karena masyarakat bukan lagi objek tetapi subjek pembangunan dan patut diberi kesempatan turut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan di desa. Dalam hal ini, masyarakat juga merupakan tujuan dari sasaran pembangunan itu sendiri.

Kepala Desa mestinya dapat memimpin masyarakat dalam berbagai aspek dengan tujuan memperbaiki kehidupan dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Desa sebenarnya ditantang dan dituntut untuk merealisasikan pembangunan dengan menggunakan pendekatan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat. Keberhasilan program dari suatu pembangunan di desa tidak terlepas dari anggota masyarakat. Jadi, hakikatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat untuk bergerak menuju suatu kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual. Dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan sejumlah program pembangunan desa dengan beberapa penyebab kegagalannya mengundang sejumlah pertanyaan mendasar tentang apa sesungguhnya pembangunan pedesaan tersebut. Pembangunan bertujuan

untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa dan masyarakat desa ikut serta terlibat sepenuhnya sehingga hasil pelaksanaan berbagai program pembangunan desa telah efektif mengubah taraf kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pernyataan di atas, maka pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan tidak dapat berjalan begitu saja tanpa didukung dengan adanya upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa. Kemauan berpartisipasi berasal dari warga itu sendiri, sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Kemauan itu juga harus didukung oleh kemampuan masyarakat, apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari masyarakat meskipun telah diberi kesempatan dan motivasi oleh pemerintah desa maka partisipasi tidak akan berjalan dengan lancar. Kemampuan berpartisipasi terkait dengan kepemilikan sumber daya yang diperlukan, baik menyangkut kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti dana dan tenaga.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seperti yang ingin melakukan gotong royong dalam pembangunan desa, kurangnya tenaga kerja yang ingin membantu menyelesaikan pembangunan tersebut, hal tersebut terjadi karena kurangnya peran pemerintah desa dalam memotivasi warganya agar lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan kemudian muncul sebuah pertanyaan bagi penulis yaitu bagaimana peranan pemerintah desa dalam memotivasi agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi pada pembangunan di desa ini. Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian ***”Peranan Pemerintah Desa Dalam Mendorong Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan di Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”***.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara

*in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu: Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, internet dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dan menunjang penulisan / penelitian. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara terhadap responden yang mengetahui informasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan juga melakukan penelusuran terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan atau referensi lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang di teliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Peranan Pemerintah Desa Dalam Mendorong Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan di Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

Program pembangunan desa untuk membuat rakyat semakin banyak punya pilihan tentang masa depan yang diinginkan. Proses pembangunan desa menghasilkan tata kehidupan masyarakat yang menumbuhkan demokrasi. Sehingga kebijakan Pemerintah terhadap program pembangunan pedesaan bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dan kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai program pembangunan desa dalam perencanaan partisipatif yang diterapkan oleh pemerintah yang secara umum untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Tetapi semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Keadaan yang demikian ini diperkuat oleh adanya

kenyataan bahwa masyarakat pedesaan masih diliputi dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial lainnya.

Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah desa juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai :

#### 1. Motivator

Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Kepala desa memotivasi warga dalam pembangunan desa, kewajiban kepala desa yaitu Kepala Desa memberikan dorongan kepada warga desanya agar berperan aktif dalam membangun desa. Pentingnya peranan motivator dalam proses pembangunan desa dan perlu dipahami oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa di Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada masyarakat desa. Kepala Desa sebagai motivator harus mampu memotivasi warga untuk aktif serta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai nantinya dapat terlaksana dengan baik tanpa ada perselisihan diantara pemerintah desa dan masyarakat setempat, sebagai kepala desa harus mampu memberikan dorongan terhadap masyarakat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga nantinya mencapai tujuan tertentu guna memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan di Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur tidak terlepas dari peranan

Pemerintah Desa itu sendiri, dan juga masyarakat yang saling mendukung atau berpartisipasi dan bersatu dalam pembangunan. Pemerintah Desa sebagai motivator dalam pembangunan, perencanaan, penyampaian program-program pembangunan, maupun pemeliharaan hasil pembangunan. Tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Keberhasilan pembangunan desa akan sangat ditentukan oleh sosok kepala desa.

Selain mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa juga harus mampu menggerakkan sumber daya manusia dengan cara memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tindak lanjut. Dengan demikian masyarakat, bukan lagi obyek pembangunan tetapi menjadi pelaku pembangunan dengan peran kepala desa sebagai motivator pembangunan.

Kepala Desa sebagai aparat pemerintah selaku abdi negara dan masyarakat, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan umum. Pemerintah desa sebagai pemerintah terendah, merupakan sebuah wadah kerjasama Kepala Desa dan Perangkatnya untuk melaksanakan urusan dekonsentrasi, desentralisasi, tugas bantuan dan tugas-tugas pokok sebagaimana sesuai dengan rencana pembangunan desa.

Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Dalam proses pembangunan disamping mengejar pencapaian dalam bentuk fisik, juga mengubah sikap mental dan pola pikir masyarakat agar lebih maju, kreatif dan dinamis. Hal ini tidak mungkin tercapai apabila tidak disertai dengan sikap keterbukaan masyarakat untuk melaksanakan

ide-ide dan gagasan dari pembangunan disertai peran serta masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sriwati Tallamma (Kepala Desa Kendekan) pada tanggal 16 Januari 2024, pukul 09.30 wita menjelaskan bahwa :

*“Peranan pemerintah desa, kami selaku pemerintah desa selalu mengajak kerjasama kepada masyarakat terutama kalau ada pembangunan masuk didesa untuk berpartisipasi didalamnya untuk melihat pembangunan yang kami laksanakan didesa. Disamping itu juga setiap ada pembangunan yang kami akan laksanakan terlebih dahulu diadakan rapat dengan masyarakat desa untuk mendengar apa saran dan masukan yang diberikan terkait pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan “. (wawancara, tanggal 16 Januari 2024).*

## 2. Fasilitator

Seorang pemimpin harus responsif terhadap kebutuhan orang atau kelompok yang dipimpinya berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan kepada masyarakat. Fasilitator berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis, dan mendesimilasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif. Fasilitator harus dapat memberikan motivasi serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan kelembagaan, dalam kegiatan tersebut fasilitator masyarakat dapat memberikan fasilitas pelaksanaan diskusi antara anggota masyarakat. Hal ini fasilitator mempunyai tugas untuk menggerakkan diskusi supaya aspirasi setiap anggota dapat terpenuhi.

Dalam hal ini kepala desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan, sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Dengan fasilitas yang diberikan kepala desa diharapkan masyarakat desa dapat mengikuti program-program desa yang sudah ada dan berpartisipasi dalam pembangunan desa karena untuk tahun ini saja program pembangunan fisik yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari rangkaian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan dapat dilihat perubahan yang signifikan khususnya pada percepatan pembangunan Desa Kendekan.

Kepala desa sebagai fasilitator desa merupakan pendamping masyarakat dalam pelaksanaan serta meningkatkan program-program pembangunan desa, artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi termasuk pendukungnya.

Peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebagai koordinator untuk mengumpulkan warga. Selain itu pemerintah desa juga sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan warga. Berbagai usulan dan kepentingan warga ditampung untuk kemudian ditentukan skala prioritasnya mana yang lebih perlu untuk dicarikan solusinya.

Semua usulan yang masuk diterima, kemudian ditentukan skala prioritas masalah mana yang perlu untuk diselesaikan lebih dahulu. Program pembangunan sekarang berbeda dengan program pembangunan terdahulu. Dahulu memang yang menentukan arah pembangunan adalah pemerintah, sedangkan masyarakat hanya diam dan tinggal merasakan hasilnya atau dengan kata lain bersifat *top-down*. Namun sekarang masyarakat sendiri yang merencanakan pembangunan, sementara Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengkoordinir kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Selain mengkoordinir usulan warga, pemerintah desa juga berperan untuk menyeleksi usulan mana yang perlu dan tidak perlu. Pemerintah desa melakukan survei agar dalam penentuan skala prioritas nantinya dapat dijadikan pertimbangan usulan dari warga mana yang diutamakan.

Kepala Desa selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan dan besar biaya yang digunakan dalam pembangunan, baik itu dalam bentuk lisan yang disampaikan disetiap kali ada musyawarah atau kegiatan desa maupun dalam bentuk tulisan yang berbentuk baleho yang di buat di area sekitar pembangunan. Kepala Desa juga selalu mengadakan rutinitas rapat yang diadakan satu tahun sekali yaitu musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes) yang bertujuan untuk menampung ide-ide masyarakat terkait kemajuan desa dan segala hal yang diperlukan oleh desa. Kepala desa juga senantiasa mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan, menyadarkan masyarakat akan tujuan dari pembangunan tersebut, dan

mengingatkan masyarakat bahwa pembangunan ini adalah pembangunan untuk desa kita dan tidak mudah untuk mendapatkan juga melaksanakannya sehingga kita harus bergotong – royong dalam pelaksanaannya sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sriwati Tallamma (Kepala Desa Kendekan) pada tanggal 16 Januari 2024, pukul 09.30 wita menjelaskan bahwa :

*“Kami sebagai pemerintah desa sering juga menyampaikan kepada masyarakat terutama dalam pembangunan desa. Kami selaku pemerintah desa sering juga mengajak masyarakat terutama dusun-dusun yang ada didesa kendekan untuk setiap ada kegiatan atau pembangunan masuk didesa, selaku masyarakat Desa Kendekan harus juga melihat atau memantau pembangunan. Selaku pemerintah desa tetap memfasilitasi masyarakat apabila ada pembangunan yang masuk didesa kami “, (wawancara, 16 Januari 2024)*

### 3. Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Dalam pelaksanaan peran sebagai dinamisator pemerintah desa memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Pemerintah sebagai penggerak sangat efektif membangun kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, maka peran pemerintah untuk memberikan motivasi dan bimbingan sangat dibutuhkan sehingga mampu mempengaruhi masyarakat desa untuk memperbaiki lingkungan dan mutu hidupnya. Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan, pemerintah desa harus mampu menjadikan dirinya terus-menerus aktif bergerak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah desa yang secara demokratis

mampu membangkitkan dan menggerakkan komponen dalam dan luarnya, aktif dalam usaha-usaha pembangunan. Efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan desa tidak terlepas dan dukungan atau partisipasi dari masyarakat.

Mengingat pula keinginan untuk menciptakan koordinasi yang sempurna antara pemerintah desa dengan masyarakat, maka dapat dikatakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah adalah dengan adanya kewibawaan dan gaya kepeloporan yang tinggi untuk diperlihatkan kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa tergugah dengan adanya semangat kerja sama yang diperlihatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai dinamisator pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat atau partisipasi aktif dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sriwati Tallamma (Kepala Desa Kendekan) pada tanggal 16 Januari 2024, pukul 09.30 wita menjelaskan bahwa :

*“ Ya...kami sebagai pemerintah desa telah berupaya sebaik mungkin apabila ada pembangunan yang masuk kedesa, kami menghimbau dan mengharapkan kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan terutama jika ada pembangunan yang masuk kedesa karena yang akan menikmati pembangunan itu adalah masyarakat itu sendiri, kami sebagai pemerintah desa hanya sebagai penggerak agar masyarakat mau berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa “(wawancara, 16 Januari 2024)*

#### **b. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Pemerintah Desa Dalam Mendorong Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.**

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan turut menentukan berhasil atau tidaknya setiap pembangunan yang dilakukan. Memang keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting sekali.

Karena masyarakat turut berperan didalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Adanya masukan-masukan seperti ide, gagasan serta konsep pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat harus ikut berpartisipasi dan saling bahu-membahu dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan pelaksanaan pembangunan desa pada khususnya. Pelaksanaan pembangunan desa tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam setiap pelaksanaan pembangunan didesa utamanya di Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu antara lain :

#### **1. Kesadaran Masyarakat**

Proses pembangunan tidak berjalan secara parsial, tapi merupakan satu kesatuan terpadu antara partisipasi masyarakat dan pembangunan karena kedua komponen ini merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sisi yang satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat, masyarakat sebagai kunci penentuan keberhasilan desa. Artinya, melalui partisipasi yang di berikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa semata tetapi menuntut keterlibatan masyarakat secara total agar dapat tercapai dan menyentuh falsafah bangsa Indonesia yaitu sila kelima pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagian besar masyarakatnya berpartisipasi secara sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan atau dorongan dari pihak lain. Keikutsertaan masyarakat yang datang secara sukarela untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan, peluang dan kesempatan yang di berikan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan sangat besar. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan aparat desa dalam hal ini pemerintah desa bahwa masyarakat bukan sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan semata, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang

dapat di andalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Tingkat kesadaran dari seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan memang dapat dikatakan relatif karena setiap perencanaan yang ada untuk melaksanakan pembangunan, maka masyarakat dengan tidak sendirinya berpartisipasi aktif tetapi selalu melalui paksaan ataupun panggilan langsung dari aparat pemerintah desa. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan desa yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sriwati Tallamma (Kepala Desa Kendekan) pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 10.00 wita menjelaskan bahwa :

*“Ya...itu salah satunya karena masyarakat tidak semua pemikirannya itu sama, ada yang memang punya kesadaran sendiri bahwa setiap ada kegiatan baik itu gotong royong atau apa selalu ikut berpartisipasi dan ada juga masyarakat yang yah istilahnya apa, mau-maunya dan itu sebagian saja, tidak semua juga masyarakat seperti itu “. (wawancara, 25 Januari 2024).*

## 2. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam pengembangan, sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentu mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting, karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi. Dikatakan sebagai salah satu syarat untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Tingkatan pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang yang

semakin luas dan kompleks. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan menimba potensi-potensi pribadinya yaitu rohani (pikir, karsa, cipta dan budi nurani) dan Jasmani (panca indera serta keterampilan- keterampilan)

Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pendidikan merupakan faktor penting untuk dimiliki oleh seluruh komponen warga Negara karena dengan pendidikan waga Negara akan mampu merubah sikap dan perilaku bahkan hidup mereka yang lebih baik. Namun apabila kita melihat tingkat pendidikan yang ada di Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur, khususnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang cukup lumayan karena kebanyakan dari mereka adalah lulusan SMA. Untuk itu bagaimana seorang pemerintah untuk dapat menggali potensi-potensi pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Hambatan masalah dalam pembangunan suatu bangsa atau negara pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya. Pada dasarnya bertitik tolak pada sumber daya manusia, sumber dana serta kualitas dari pembangunan itu sendiri. Keberhasilan suatu pembangunan adalah berasal dari kemampuan sumber daya manusia serta sumber dana yang ada. Apabila dilihat pembangunan suatu desa bukan saja berdasarkan sumber daya manusia dan sumber dana yang tersedia. Tetapi yang paling dominan pembangunan desa selalu didukung oleh partisipasi masyarakat desa.

Dalam pembangunan suatu desa yang paling menonjol adalah partisipasi masyarakatnya. Disamping ini juga ikut menentukan adalah sumber daya manusianya yang ada, serta sumber daya alam yang diperlukan. Pembangunan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sriwati Tallamma (Kepala Desa Kendekan) pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 10.00 wita menjelaskan bahwa :

*“ faktor itu juga mungkin salah satu penghambat karena kita sudah tau kalau Desa Kendekan itu jauh dari ibukota kecamatan dan*

*kabupaten, sehingga anak-anak keluar sampai berapa kilo untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi seperti SMA karena belum ada di Desa Kendekan, yang ada cuman SD dan SMP. Jadi mungkin salah satunya kadang kami juga susah mencari yang sudah berpendidikan karena sekarang kita sudah tau minimal SMA lah yang bisa kita pekerjakan tapi kalau untuk pekerjaan apabila ada pembangunan masuk di Desa Kendekan kami juga bisa mengajak masyarakat meskipun pendidikannya masih dibawah“(wawancara, 25 Januari 2024).*

### 3. Sikap Mental Masyarakat

Perilaku orang banyak biasanya dipengaruhi oleh sikap yang senantiasa selalu berhubungan dengan obyek tertentu. Kalau seseorang mempunyai sikap yang positif maka kecenderungan untuk melakukan suatu tindak ke obyek sikap positif tersebut sangat besar peluangnya dibandingkan dengan yang bersifat negatif.

Masalah sikap (sikap mental) dalam melaksanakan kegiatan pembangunan adalah sangat penting, sebab salah satu kelemahan bangsa kita adalah disebabkan karena rendahnya masalah sikap (sikap mental) dalam membangun. Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila dibarengi dengan kesiapan sikap mental masyarakat untuk membangun. Biasanya faktor-faktor sikap yang rendah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dapat dipengaruhi oleh sikap mental yang suka menerobos, sikap mental yang tidak percaya kepada diri sendiri, sikap mental yang tidak berdisiplin yang murni dan sikap mental yang mengabaikan tanggung jawab.

Untuk melaksanakan suatu pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi dalam kegiatan perencanaan, partisipasi ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa. Namun, tidak hal yang mudah dalam membangun partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dan lazim diberikan oleh anggota masyarakat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan suatu program pembangunan adalah berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong royong. Gotong royong merupakan adalah pengerahan tenaga kerja tanpa bayaran untuk suatu proyek yang

bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk pemerintah. Aktifitas gotong-royong selalu diiringi dengan pengerahan tenaga tanpa pamrih untuk kepentingan umum atau bersama.

Faktor tradisi masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat memang selalu ada seperti berpesta, hidup boros, dalam melakukan hal-hal yang kurang berguna maupun dalam menghargai waktu yang terus berjalan dan terus berlalu itu namun hal tersebut di atas tidak menutup kemungkinan kepada masyarakat setempat untuk berbuat atau melakukan suatu karya atau apapun yang menurut mereka berguna bagi diri mereka sendiri maupun untuk keluarga bahkan untuk lingkungan mereka.

Memang kebiasaan-kebiasaan seperti itu sangat sulit untuk kita rubah karena sudah tertanam dalam jiwa mereka, tinggal bagaimana pemerintah desa dapat memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan apabila terdapat hal-hal yang positif atau faktor tradisi-tradisi positif masyarakat seperti kemauan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif, maka pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk menunjang keberhasilan kepemimpinannya serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Dalam mewujudkan kesadaran masyarakatnya diperlukan usaha untuk mengkomunikasikan program-program apa yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Dalam membangun kesadaran masyarakat tidak hanya diperlukan pemerintah desa dan perangkatnya yang memikul beban dan tanggung jawab, namun masyarakat setempat juga harus memiliki keikutsertaan dalam pelaksanaannya. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pembangunan dan masyarakat juga menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan. Sebagai kewajiban, masyarakat wajib ikut serta memikul beban pembangunan desa dan menyukseskan jalannya pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sriwati Tallamma (Kepala Desa Kendekan) pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 10.00 wita menjelaskan bahwa :

*“ Kalau terkait masalah fisik dan mental, utamanya masyarakat Desa Kendekan ya dasarnya memang sudah pekerja sering melakukan pekerjaan yang berat jadi kalau ada pembangunan di desa ya untuk meringankan beban kita kerja secara gotong royong, bersama-sama melakukan pembangunan yang masuk kedesa kita. Tapi seperti yang saya*

katakan tadi bahwa ada juga masyarakat yang acuh tak acuh atau tidak peduli kalau ada pembangunan yang masuk ke desa namun tidak semuanya hanya sebahagian saja “ (wawancara, 25 Januari 2024).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur dilaksanakan dalam bentuk; motivator, fasilitator dan dinamisator
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur antara lain : kesadaran masyarakat, pendidikan masyarakat dan sikap mental masyarakat.

### b. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka, perlu adanya saran terkait Peranan pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur yaitu :

1. Bagi pihak pemerintah desa diharapkan untuk selalu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota masyarakat dalam berpartisipasi. Upaya yang telah dilakukan sebelumnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala bentuk, tetap perlu ditingkatkan untuk kemajuan desa secara maksimal. Mengingat terdapat banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang dapat berdampak negatif, maka pihak pemerintah desa harus selalu mengupayakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat, memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, mengajak masyarakat untuk tidak berhenti terlibat aktif dalam partisipasi, dan menggemakan budaya gotong royong dalam setiap kegiatan kemasyarakatan khususnya pada pembangunan desa.
2. Bagi seluruh masyarakat desa diharapkan agar selalu menunjukkan dukungannya pada pemerintah desa dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai bentuk pembangunan desa. Harus selalu menjaga dan mempertahankan

serta melestarikan gotong royong sebagai suatu budaya yang dapat bermanfaat pula bagi percepatan pembangunan desa. .

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adi, Isbandi rukminto. 2007. *“Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat”*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, R. 2006. *“Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asep Muslim, 2007, *“Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah”*, Perca, Jakarta. h. 99.
- Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, 2005. *“Sistem Pemerintahan Indonesia”*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 21
- Conyers; Diana, (Setiawan, Penerjamah), *“Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga (Suatu Pengantar)”*. Yogyakarta, Penerbit: Gadjah Mada University Press.
- David Berry, *“Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi”* Jakarta: Raja Grafindo Persada,2009, h. 99
- Didik G. Suharto, 2016, *“Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 193.
- Haliim, W. 2020. *“Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif”*. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91–104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Hamijoyo, S. 2007. *“Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi”*, Yogyakarta: UGM Press.
- Hanif Nurcholis, *“Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*, ... Op.Cit. h. 138.
- Herman Abdullah, 2009, *“Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di*

- Indonesia*”, Rmbooks, Jakarta. h. 131-132.
- Ibrahim, Amin. 2009. *“Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya”*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Juliantara, D. 2004. *“Pembaruan Kabupaten Arah Realisasi Otonomi Daerah”*. Pustaka Jakarta: Jaya Mandiri.
- Kurniyati, Y. 2019. *“Partispasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara”*. Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung.
- Laksana, Nuring Septyasa. 2013. *“Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: Volume 1, Nomor 1
- Moch, Solekhan, *“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat”*, h. 76-77.
- Miftah Thoha. 2012. *“Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya”*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mikkelsen, B. 2011. *“Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan”*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *“Pengembangan Masyarakat”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Paulus Effendi Lotulung, 2013, *“Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan”*, Salemba Humanika, Jakarta. h. 143.
- Prasetya, Todaro. 2006. *“Pengembangan Dalam Kemajuan Desa”*. Surabaya: Alfabeta Lankip
- Rahman, K. 2016. *“Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa”*. WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 2(1), 189–199.
- Riyadi. 2002. *“Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah”*. Jakarta. Gramedia.
- Rorong, F., Rares, J. J. dan Ruru, J. M. 2017. *“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara”*. Jurnal Administrasi Publik, 3(046).
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik: “Teori dan Aplikasi Good Governance”*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sutarto Wijono. 2018. *“Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi”*. Prenadamedia Group.
- Siagian, Sondang P. 2015. *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soekanto, Soejono. 2012 *“Sosiologi Suatu Pengantar”*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Slamet, Y. *“Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi”*. Sebelas Maret University Press
- Theresia, Aprillia, dkk. 2014. *“Pembangunan Berbasis Masyarakat”*: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- b. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.